



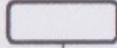
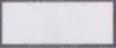
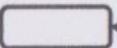
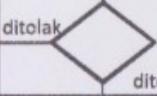
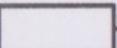
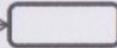
**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor SOP	01/	SOP/
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2022	
Tanggal Revisi	01 Agustus 2022	
Tanggal Efektif	01 September 2022	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	
	 Ir. Iman Djuniawal, M.Si Pembina TK I NIP. 19680613 199903 1 003	
Judul SOP	UJI KONSEKUENSI	

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi4 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik5 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam pengurusan administrasi surat mnyurat2. Memahami Peraturan yang berkaitan dengan Informasi Publik3. Memiliki kemampuan pendokumentasian Pelayanan Publik
Keterkaitan SOP Pendokumentasian Informasia Publik SOP Pendokumentasian Informasia yang dikecualikan SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Buku agenda surat masuk Daftar Pemohon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 UJI KONSEKUENSI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

SOP - 03

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PPID DKP	PPID Bidang Uji Konsekunesi	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Identifikasi informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim PPID Bidang Uji Konsekuensi DKP				Dokumen Informasi Publik Peraturan UU	5 Hari	Konsep Hasil Identifikasi	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep, Identifikasi	2 Hari	Rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup				Dokumen Informasi Publik Peraturan UU	2 Hari	Surat Penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 Hari	Keputusan Atasan PPID	Surat Keputusan
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	2 Hari	Keputusan Atasan PPID	